



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 38 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
21. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung;
23. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 23 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Lampung Tahun 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

1. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
3. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
4. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
7. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Pembayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
11. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
12. Rencana Pembanguan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
15. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

16. Kepala Daerah adalah Gubernur bagi Daerah provinsi, Bupati bagi Daerah kabupaten, atau Wali kota bagi Daerah kota.
17. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
18. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp7.412.643.433.222,00 yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp4.146.226.408.108,00 yang terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.982.798.551.971,00
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp8.460.460.518,00
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp375.247.133.261,00
- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp779.720.262.358,00

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp2.982.798.551.971,00 yang terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
 - d. Pajak Air Permukaan (PAP); dan
 - e. Pajak Rokok;
- (2) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp950.000.000.000,00
- (3) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp660.000.000.000,00

- (4) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp750.000.000.000,00
- (5) Pajak Air Permukaan (PAP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00
- (6) Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp616.798.551.971,00

Pasal 6

- (1) Anggaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a direncanakan sebesar Rp950.000.000.000,00 yang terdiri atas:
 - a) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Mobil Penumpang direncanakan sebesar Rp950.000.000.000,00
- (2) Anggaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b direncanakan sebesar Rp660.000.000.000,00 yang terdiri atas:
 - a) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)-Mobil Roda Tiga direncanakan sebesar Rp660.000.000.000,00
- (3) Anggaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)-Bahan Bakar Gas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c direncanakan sebesar Rp750.000.000.000,00 yang terdiri atas:
 - a) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Bahan Bakar Gas direncanakan sebesar Rp750.000.000.000,00
- (4) Anggaran Pajak Air Permukaan (PAP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00 yang terdiri atas:
 - a) Pajak Air Permukaan direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00
- (5) Anggaran Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e direncanakan sebesar Rp616.798.551.971,00 yang terdiri atas:
 - a) Pajak Rokok direncanakan sebesar Rp616.798.551.971,00

Pasal 7

- (1) Anggaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp8.460.460.518,00 yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum direncanakan sebesar Rp626.742.938,00
 - b. Retribusi Jasa Usaha direncanakan sebesar Rp7.467.241.080,00
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu direncanakan sebesar Rp366.476.500,00
- (2) Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp375.247.133.261,00 yang terdiri atas:
 - a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) direncanakan sebesar Rp50.130.633.261,00
 - b. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) direncanakan sebesar Rp325.116.500.000,00
- (3) Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp779.720.262.358,00 yang terdiri atas:

- a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan direncanakan sebesar Rp395.237.707.252,00
- b. Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin direncanakan sebesar Rp35.000.000,00
- c. Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan direncanakan sebesar Rp151.707.252,00
- d. Hasil Penjualan Aset Lainnya direncanakan sebesar Rp51.000.000,00
- e. Jasa Giro direncanakan sebesar Rp28.782.362.007,00
- f. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah direncanakan sebesar Rp720.000.000,00
- g. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan direncanakan sebesar Rp422.953.760,00
- h. Pendapatan Denda Pajak Daerah direncanakan sebesar Rp19.763.584.181,00
- i. Pendapatan Denda Retribusi Daerah direncanakan sebesar Rp5.000.000,00
- j. Pendapatan dari Pengembalian direncanakan sebesar Rp16.977.715.158,00
- k. Pendapatan BLUD direncanakan sebesar Rp317.810.940.000,00

Pasal 8

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp7.381.761.189.686,00 yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasional;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 9

- (1) Anggaran Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp4.636.204.889.720,96 yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Bunga;
 - d. Belanja Subsidi;
 - e. Belanja Hibah; dan
 - f. Belanja Bantuan Sosial
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.145.054.774.646,42
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.783.971.961.661,54
- (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.547.643.288,00
- (5) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00
- (6) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp689.739.545.425,00
- (7) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp13.890.964.700,00

Pasal 10

Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.145.054.774.646,42 yang terdiri atas:

- a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN direncanakan sebesar Rp 1.127.714.395.920,17
- b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN direncanakan sebesar Rp365.036.860.113,01
- c. Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN direncanakan sebesar Rp404.933.405.858,74
- d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD direncanakan sebesar Rp68.998.297.470,00
- e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp2.830.040.277,50
- f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp5.437.800.007,00
- g. Belanja Pegawai BOS direncanakan sebesar Rp86.771.735.000,00
- h. Belanja Pegawai BLUD direncanakan sebesar Rp83.332.240.000,00

Pasal 11

Anggaran Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.127.714.395.920,17 yang terdiri atas:

- a. Belanja Gaji Pokok ASN direncanakan sebesar Rp838.153.975.590,01
- b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN direncanakan sebesar Rp84.556.832.589,30
- c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN direncanakan sebesar Rp12.597.576.675,00
- d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN direncanakan sebesar Rp65.502.944.176,00
- e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN direncanakan sebesar Rp15.905.264.721,00
- f. Belanja Tunjangan Beras ASN direncanakan sebesar Rp49.331.151.507,50
- g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN direncanakan sebesar Rp1.120.605.318,78
- h. Belanja Pembulatan Gaji ASN direncanakan sebesar Rp1.146.045.342,58
- i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN direncanakan sebesar Rp52.600.000.000,00

Pasal 12

(1) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b direncanakan sebesar Rp365.036.860.113,01 yang terdiri atas:

- a. Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN direncanakan sebesar Rp362.984.566.221,01
- b. Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN direncanakan sebesar Rp1.284.293.892,00
- c. Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN direncanakan sebesar Rp768.000.000,00

(2) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c direncanakan sebesar Rp404.933.405.858,74 yang terdiri atas;

- a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah direncanakan sebesar Rp77.540.946.663,62
- b. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD direncanakan sebesar Rp309.752.127.000,00

- c. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD direncanakan sebesar Rp2.217.000.000,00
 - d. Belanja Honorarium direncanakan sebesar Rp15.423.332.195,12
- (3) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d direncanakan sebesar Rp68.998.297.470,00 yang terdiri atas:
- a. Belanja Uang Representasi DPRD direncanakan sebesar Rp2.696.400.000,00
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD direncanakan sebesar Rp377.496.000,00
 - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD direncanakan sebesar Rp438.238.920,00
 - d. Belanja Uang Paket DPRD direncanakan sebesar Rp231.120.000,00
 - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD direncanakan sebesar Rp3.909.780.000,00
 - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD direncanakan sebesar Rp314.766.000,00
 - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD direncanakan sebesar Rp395.937.000,00
 - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Insentif Pimpinan dan Anggota DPRD direncanakan sebesar Rp15.300.000.000,00
 - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD direncanakan sebesar Rp3.825.000.000,00
 - j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD direncanakan sebesar Rp70.570.854,00
 - k. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD direncanakan sebesar Rp23.613.588.696,00
 - l. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD direncanakan sebesar Rp17.640.000.000,00
 - m. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD direncanakan sebesar Rp185.400.000,00
- (4) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e direncanakan sebesar Rp2.830.040.277,50 yang terdiri atas:
- a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp75.600.000,00
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp9.072.000,00
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp136.080.000,00
 - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp6.083.280,00
 - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp3.203.617,50
 - f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp1.380,00
 - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH sebesar Rp100.000.000,00
 - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp250.000.000,00
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp250.000.000,00
 - j. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00
- (5) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f direncanakan sebesar Rp5.437.800.007,00 yang terdiri atas:

- a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD direncanakan sebesar Rp432.000.000,00
 - b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp5.005.800.007,00
- (6) Anggaran Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g direncanakan sebesar Rp86.771.735.000,00 yang terdiri atas:
- a. Belanja Pegawai BOS direncanakan sebesar Rp86.771.735.000,00
- (7) Anggaran Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf h direncanakan sebesar Rp83.332.240.000,00 yang terdiri atas:
- a. Belanja Pegawai BLUD direncanakan sebesar Rp83.332.240.000,00

Pasal 13

Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.783.971.961.661,54 yang terdiri atas:

- a. Belanja Barang direncanakan sebesar Rp389.361.982.254,54
- b. Belanja Jasa direncanakan sebesar Rp654.588.263.318,00
- c. Belanja Pemeliharaan direncanakan sebesar Rp120.271.976.605,00
- d. Belanja Perjalanan Dinas direncanakan sebesar Rp214.547.785.408,00
- e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat direncanakan sebesar Rp40.890.760.900,00
- f. Belanja Barang dan Jasa BOS direncanakan sebesar Rp179.227.059.840,00
- g. Belanja Barang dan Jasa BLUD direncanakan sebesar Rp185.084.133.336,00

Pasal 14

Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp389.361.982.254,54 yang terdiri atas:

- a. Belanja Barang Pakai Habis direncanakan sebesar Rp389.127.727.964,54
- b. Belanja Barang Tak Pakai Habis direncanakan sebesar Rp234.254.290,00

Pasal 15

Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp654.588.263.318,00 yang terdiri atas:

- a. Belanja Jasa Kantor direncanakan sebesar Rp307.618.638.559,00
- b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi direncanakan sebesar Rp171.841.720.716,00
- c. Belanja Sewa Tanah direncanakan sebesar Rp575.000.000,00
- d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin direncanakan sebesar Rp61.024.810.242,00
- e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan direncanakan sebesar Rp36.508.170.000,00
- f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya direncanakan sebesar Rp236.475.000,00
- g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi direncanakan sebesar Rp51.842.518.400,00
- h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi direncanakan sebesar Rp11.677.595.000,00
- i. Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) direncanakan sebesar Rp150.695.000,00
- j. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS direncanakan sebesar Rp49.200.000,00
- k. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan direncanakan sebesar Rp13.063.440.401,00

Pasal 16

Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c direncanakan sebesar Rp120.271.976.605,00 yang terdiri atas:

- a. Belanja Pemeliharaan Tanah direncanakan sebesar Rp76.500.000,00
- b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin direncanakan sebesar Rp38.936.085.065,00
- c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan direncanakan sebesar Rp8.461.443.020,00
- d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi direncanakan sebesar Rp72.445.048.520,00
- e. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya direncanakan sebesar Rp322.900.000,00
- f. Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud direncanakan sebesar Rp30.000.000,00

Pasal 17

Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d direncanakan sebesar Rp214.547.785.408,00 yang terdiri atas:

- a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri direncanakan sebesar Rp212.326.727.408,00
- b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri direncanakan sebesar Rp2.221.058.000,00

Pasal 18

Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e direncanakan sebesar Rp40.890.760.900,00 yang terdiri atas:

- a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat direncanakan sebesar Rp14.227.263.400,00
- b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat direncanakan sebesar Rp26.663.497.500,00

Pasal 19

Anggaran Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f direncanakan sebesar Rp179.227.059.840,00 yang terdiri atas:

- a. Belanja Barang dan Jasa BOS direncanakan sebesar Rp179.227.059.840,00

Pasal 20

Anggaran Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g direncanakan sebesar Rp185.084.133.336,00 yang terdiri atas:

- a. Belanja Barang dan Jasa BLUD direncanakan sebesar Rp185.084.133.336,00

Pasal 21

Anggaran Belanja Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.547.643.288,00 yang terdiri atas:

- a. Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang direncanakan sebesar Rp3.547.643.288,00

Pasal 22

Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp689.739.545.425,00 yang terdiri atas:

- a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat direncanakan sebesar Rp174.745.399.860,00
- b. Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya direncanakan sebesar Rp152.973.674.946,00
- c. Belanja Hibah kepada BUMN direncanakan sebesar Rp9.996.790.000,00
- d. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia direncanakan sebesar Rp147.656.581.419,00
- e. Belanja Hibah Dana BOS direncanakan sebesar Rp194.843.760.000,00
- f. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik direncanakan sebesar Rp9.523.339.200,00

Pasal 23

Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp13.890.964.700,00 yang terdiri atas:

- a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu direncanakan sebesar Rp12.885.000.000,00
- b. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat direncanakan sebesar Rp1.005.964.700,00

Pasal 24

Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp1.250.016.555.778,00 yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Tanah direncanakan sebesar Rp3.624.600.000,00
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin direncanakan sebesar Rp115.932.440.032,00
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan direncanakan sebesar Rp303.025.048.354,00
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi direncanakan sebesar Rp798.803.110.870,00
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya direncanakan sebesar Rp28.631.356.522,00

Pasal 25

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c direncanakan sebesar Rp31.500.000.000,00 yang terdiri atas:

- a. Belanja Tidak Terduga direncanakan sebesar Rp31.500.000.000,00

Pasal 26

Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d direncanakan sebesar Rp1.464.039.744.187,04 yang terdiri atas:

- a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten direncanakan sebesar Rp1.235.021.078.580,00
- b. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota direncanakan sebesar Rp229.018.665.607,04

Pasal 27

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 yang terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 28

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp75.000.000.000,00 yang terdiri atas:
 - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya;
 - b. Pencairan Dana Cadangan;
 - c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;
 - d. Penerimaan Pinjaman Daerah;
 - e. Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah; dan
 - f. Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp75.000.000.000,00
- (3) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00
- (4) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00
- (5) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00
- (6) Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00
- (7) Penerimaan Pembiayaan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00

Pasal 29

Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp75.000.000.000,00 yang terdiri atas:

- a. Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp75.000.000.000,00

Pasal 30

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp105.882.243.536,00 yang terdiri atas:
 - a. Pembentukan Dana Cadangan;
 - b. Penyertaan Modal;
 - c. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo;
 - d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan
 - e. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00
- (3) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00
- (4) Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp105.882.243.536,00
- (5) Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00
- (6) Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00

Pasal 31

- (1) Anggaran Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp105.882.243.536,00 yang terdiri atas:
 - a. Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) direncanakan sebesar Rp105.882.243.536,00

Pasal 32

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya Suplus sebesar Rp30.882.243.536,00
- (2) Pembiayaan Netto yang merupakan selisih Penerimaan Pembiayaan terhadap Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar (Rp30.882.243.536,00)

Pasal 33

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini terdiri atas:

- a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III.A Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah Uang;
- d. Lampiran III.B Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. Lampiran IV.A Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial Uang;
- f. Lampiran IV.B Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial Barang;
- g. Lampiran V.A Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum;
- h. Lampiran V.B Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus;
- i. Lampiran VI.A Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil Kabupaten;
- j. Lampiran VI.B Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil Kota;
- k. Lampiran VI.C Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil Desa;
- l. Lampiran VII.A Rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- m. Lampiran VII.B Rincian Dana Tambahan Infrastruktur menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;

- n. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- o. Lampiran IX Sinkronisasi kebijakan pemerintah provinsi/kabupaten/kota pada daerah perbatasan dalam rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan Negara;
- p. Lampiran X Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung dalam rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan Negara;
- q. Lampiran XI Daftar piutang daerah.

Pasal 34

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 35

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 16-12- 2022



Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 16 - 12 - 2022



Lampiran I : Peraturan Gubernur Tahun Anggaran 2023

Nomor : 38 Tahun 2022

Tanggal : 16 Desember 2022

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI
MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	7.412.643.433.222,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.146.226.408.108,00
4.1.01	Pajak Daerah	2.982.798.551.971,00
4.1.01.01	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	950.000.000.000,00
4.1.01.01.01	PKB-Mobil Penumpang-Sedan	19.258.001.000,00
4.1.01.01.01.01	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi	17.666.332.000,00
4.1.01.01.01.02	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Umum	275.822.000,00
4.1.01.01.01.03	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Pusat	532.285.000,00
4.1.01.01.01.04	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Daerah	783.562.000,00
4.1.01.01.02	PKB-Mobil Penumpang-Jeep	72.489.957.000,00
4.1.01.01.02.01	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pribadi	71.368.410.000,00
4.1.01.01.02.03	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemerintah Pusat	338.243.000,00
4.1.01.01.02.04	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemerintah Daerah	783.304.000,00
4.1.01.01.03	PKB-Mobil Penumpang-Minibus	394.612.369.000,00
4.1.01.01.03.01	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pribadi	390.986.886.000,00
4.1.01.01.03.02	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Umum	526.546.000,00
4.1.01.01.03.03	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Pusat	590.584.000,00
4.1.01.01.03.04	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Daerah	2.508.353.000,00
4.1.01.01.04	PKB-Mobil Bus-Microbus	2.369.000.000,00
4.1.01.01.04.01	PKB-Mobil Bus-Microbus-Pribadi	1.557.884.000,00
4.1.01.01.04.02	PKB-Mobil Bus-Microbus-Umum	606.641.000,00
4.1.01.01.04.03	PKB-Mobil Bus-Microbus-Pemerintah Pusat	74.613.000,00
4.1.01.01.04.04	PKB-Mobil Bus-Microbus-Pemerintah Daerah	129.862.000,00
4.1.01.01.05	PKB-Mobil Bus-Bus	871.400.000,00
4.1.01.01.05.01	PKB-Mobil Bus-Bus-Pribadi	300.501.000,00
4.1.01.01.05.02	PKB-Mobil Bus-Bus-Umum	554.941.000,00
4.1.01.01.05.03	PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Pusat	11.322.000,00
4.1.01.01.05.04	PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Daerah	4.636.000,00
4.1.01.01.06	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	79.040.699.000,00
4.1.01.01.06.01	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pribadi	78.126.020.000,00
4.1.01.01.06.02	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Umum	109.523.000,00
4.1.01.01.06.03	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pemerintah Pusat	122.464.000,00
4.1.01.01.06.04	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pemerintah Daerah	682.692.000,00
4.1.01.01.07	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	97.249.899.000,00
4.1.01.01.07.01	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pribadi	64.586.179.000,00
4.1.01.01.07.02	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Umum	32.333.623.000,00
4.1.01.01.07.03	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pemerintah Pusat	25.021.000,00
4.1.01.01.07.04	PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pemerintah Daerah	305.076.000,00
4.1.01.01.08	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck	67.514.476.000,00
4.1.01.01.08.01	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pribadi	24.465.229.000,00
4.1.01.01.08.02	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Umum	43.040.597.000,00

Kode	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	2	3
4.1.01.01.08.03	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pemerintah Pusat	5.046.000,00
4.1.01.01.08.04	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pemerintah Daerah	3.604.000,00
4.1.01.01.09	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	1.795.200.000,00
4.1.01.01.09.01	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pribadi	1.766.385.000,00
4.1.01.01.09.02	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Umum	296.000,00
4.1.01.01.09.03	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pemerintah Pusat	1.309.000,00
4.1.01.01.09.04	PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pemerintah Daerah	27.210.000,00
4.1.01.01.010	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	214.651.600.000,00
4.1.01.01.010.0	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pribadi	213.570.219.000,00
1		
4.1.01.01.010.0	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Pusat	190.692.000,00
3		
4.1.01.01.010.0	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Daerah	890.689.000,00
4		
4.1.01.01.011	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	142.399.000,00
4.1.01.01.011.0	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pribadi	123.676.000,00
1		
4.1.01.01.011.0	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah Pusat	1.460.000,00
3		
4.1.01.01.011.0	PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah Daerah	17.263.000,00
4		
4.1.01.01.014	PKB-Mobil Roda Tiga	5.000.000,00
4.1.01.01.014.0	PKB-Mobil Roda Tiga-Pribadi	3.000.000,00
1		
4.1.01.01.014.0	PKB-Mobil Roda Tiga-Pemerintah Pusat	2.000.000,00
3		
4.1.01.02	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	660.000.000.000,00
4.1.01.02.01	BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	2.654.000.000,00
4.1.01.02.01.01	BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	2.654.000.000,00
4.1.01.02.02	BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	54.097.000.000,00
4.1.01.02.02.01	BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	54.097.000.000,00
4.1.01.02.03	BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	217.741.000.000,00
4.1.01.02.03.01	BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	217.741.000.000,00
4.1.01.02.04	BBNKB-Mobil Bus-Microbus	1.358.000.000,00
4.1.01.02.04.01	BBNKB-Mobil Bus-Microbus	1.358.000.000,00
4.1.01.02.05	BBNKB-Mobil Bus-Bus	300.000.000,00
4.1.01.02.05.01	BBNKB-Mobil Bus-Bus	300.000.000,00
4.1.01.02.06	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	78.874.000.000,00
4.1.01.02.06.01	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	78.874.000.000,00
4.1.01.02.07	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	26.859.000.000,00
4.1.01.02.07.01	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	26.859.000.000,00
4.1.01.02.08	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck	24.023.000.000,00
4.1.01.02.08.01	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck	24.023.000.000,00
4.1.01.02.09	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	3.988.000.000,00
4.1.01.02.09.01	BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	3.988.000.000,00
4.1.01.02.010	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	247.591.000.000,00
4.1.01.02.010.0	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	247.591.000.000,00
1		
4.1.01.02.011	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	2.465.000.000,00
4.1.01.02.011.0	BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	2.465.000.000,00
1		
4.1.01.02.014	BBNKB-Mobil Roda Tiga	50.000.000,00

Kode	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	2	3
4.1.01.02.014.0 1	BBNKB-Mobil Roda Tiga	50.000.000,00
4.1.01.03	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	750.000.000.000,00
4.1.01.03.01	PBBKB-Bahan Bakar Bensin	435.178.896.532,00
4.1.01.03.01.01	PBBKB Bahan Bakar Bensin	435.178.896.532,00
4.1.01.03.02	PBBKB-Bahan Bakar Solar	314.821.103.468,00
4.1.01.03.02.01	PBBKB Bahan Bakar Solar	314.821.103.468,00
4.1.01.04	Pajak Air Permukaan	6.000.000.000,00
4.1.01.04.01	Pajak Air Permukaan	6.000.000.000,00
4.1.01.04.01.01	Pajak Air Permukaan	6.000.000.000,00
4.1.01.05	Pajak Rokok	616.798.551.971,00
4.1.01.05.01	Pajak Rokok	616.798.551.971,00
4.1.01.05.01.01	Pajak Rokok	616.798.551.971,00
4.1.02	Retribusi Daerah	8.460.460.518,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	626.742.938,00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	376.742.938,00
4.1.02.01.01.06	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	376.742.938,00
4.1.02.01.07	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	250.000.000,00
4.1.02.01.07.03	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Penyelamatan Jiwa	250.000.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	7.467.241.080,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	4.922.318.430,00
4.1.02.02.01.01	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	743.427.700,00
4.1.02.02.01.03	Retribusi Penyewaan Bangunan	51.250.000,00
4.1.02.02.01.04	Retribusi Pemakaian Laboratorium	1.198.527.980,00
4.1.02.02.01.05	Retribusi Pemakaian Ruangan	2.249.257.250,00
4.1.02.02.01.07	Retribusi Pemakaian Alat	679.855.500,00
4.1.02.02.03	Retribusi Tempat Pelelangan	550.000.000,00
4.1.02.02.03.01	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	550.000.000,00
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	50.000.000,00
4.1.02.02.04.01	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	50.000.000,00
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	373.475.000,00
4.1.02.02.05.01	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	373.475.000,00
4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	75.000.000,00
4.1.02.02.08.01	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	75.000.000,00
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	315.163.250,00
4.1.02.02.09.01	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	315.163.250,00
4.1.02.02.011	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	1.181.284.400,00
4.1.02.02.011.0 1	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	391.653.400,00
4.1.02.02.011.0 2	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak	472.946.000,00
4.1.02.02.011.0 3	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	177.685.000,00
4.1.02.02.011.0 4	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	139.000.000,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	366.476.500,00
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	110.010.500,00
4.1.02.03.03.01	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	110.010.500,00

Kode	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	2	3
4.1.02.03.04	Retribusi Izin Usaha Perikanan	166.466.000,00
4.1.02.03.04.01	Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Penangkapan Ikan	166.466.000,00
4.1.02.03.06	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	90.000.000,00
4.1.02.03.06.01	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	90.000.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	375.247.133.261,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	375.247.133.261,00
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	50.130.633.261,00
4.1.03.02.01.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	50.130.633.261,00
4.1.03.02.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	325.116.500.000,00
4.1.03.02.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	325.116.500.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	779.720.262.358,00
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	395.237.707.252,00
4.1.04.01.01	Hasil Penjualan Tanah	395.000.000.000,00
4.1.04.01.01.01	Hasil Penjualan Tanah	395.000.000.000,00
4.1.04.01.02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	35.000.000,00
4.1.04.01.02.01	Hasil Penjualan Alat Besar	35.000.000,00
4.1.04.01.03	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	151.707.252,00
4.1.04.01.03.01	Hasil Penjualan Bangunan Gedung	151.707.252,00
4.1.04.01.06	Hasil Penjualan Aset Lainnya	51.000.000,00
4.1.04.01.06.02	Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain	51.000.000,00
4.1.04.05	Jasa Giro	28.782.362.007,00
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	28.700.401.324,00
4.1.04.05.01.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	28.700.401.324,00
4.1.04.05.02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	81.960.683,00
4.1.04.05.02.01	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	81.960.683,00
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	720.000.000,00
4.1.04.08.01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	720.000.000,00
4.1.04.08.01.01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	720.000.000,00
4.1.04.011	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	422.953.760,00
4.1.04.011.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	422.953.760,00
4.1.04.011.01.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	422.953.760,00
4.1.04.012	Pendapatan Denda Pajak Daerah	19.763.584.181,00
4.1.04.012.01	Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	18.678.814.181,00
4.1.04.012.01.01	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Sedan	480.002.304,00
4.1.04.012.01.02	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Jeep	1.178.078.527,00
4.1.04.012.01.03	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Minibus	6.116.327.203,00
4.1.04.012.01.04	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Microbus	41.265.512,00
4.1.04.012.01.05	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Bus	27.377.360,00

Kode	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	2	3
4.1.04.012.01.06	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	2.000.021.372,00
4.1.04.012.01.07	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	1.891.970.357,00
4.1.04.012.01.08	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Truck	2.227.890.000,00
4.1.04.012.01.09	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	26.361.294,00
4.1.04.012.01.010	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	4.682.279.505,00
4.1.04.012.01.011	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	2.429.137,00
4.1.04.012.01.013	Pendapatan Denda PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar	4.509.410,00
4.1.04.012.01.014	Pendapatan Denda PKB-Mobil Roda Tiga	302.200,00
4.1.04.012.02	Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	980.920.000,00
4.1.04.012.02.01	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	4.543.755,00
4.1.04.012.02.02	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	104.540.510,00
4.1.04.012.02.03	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	342.481.605,00
4.1.04.012.02.04	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Bus-Microbus	3.688.555,00
4.1.04.012.02.05	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Bus-Bus	1.200.000,00
4.1.04.012.02.06	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	139.205.285,00
4.1.04.012.02.07	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	90.693.280,00
4.1.04.012.02.08	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck	102.048.025,00
4.1.04.012.02.09	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	7.878.877,00
4.1.04.012.02.010	Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	182.316.718,00
4.1.04.012.02.011	Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	1.523.390,00
4.1.04.012.02.014	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Roda Tiga	800.000,00
4.1.04.012.03	Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	100.000.000,00
4.1.04.012.03.02	Pendapatan Denda PPBKB-Bahan Bakar Solar	100.000.000,00
4.1.04.012.04	Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan	3.850.000,00
4.1.04.012.04.01	Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan	3.850.000,00
4.1.04.013	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	5.000.000,00
4.1.04.013.02	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	5.000.000,00
4.1.04.013.02.01	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	5.000.000,00

Kode	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	2	3
4.1.04.015	Pendapatan dari Pengembalian	16.977.715.158,00
4.1.04.015.01	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21	14.171.801.266,00
4.1.04.015.01.01	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21	14.171.801.266,00
4.1.04.015.03	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	2.601.427.621,00
4.1.04.015.03.01	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	2.601.427.621,00
4.1.04.015.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	204.486.271,00
4.1.04.015.04.01	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Biasa	204.486.271,00
4.1.04.016	Pendapatan BLUD	317.810.940.000,00
4.1.04.016.01	Pendapatan BLUD	317.810.940.000,00
4.1.04.016.01.01	Pendapatan BLUD	317.810.940.000,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.251.814.923.379,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.224.292.047.691,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	3.173.446.713.691,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	232.171.663.691,00
4.2.01.01.01.01	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	37.545.790.832,00
4.2.01.01.01.02	DBH PPh Pasal 21	79.917.272.842,00
4.2.01.01.01.03	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	9.277.154.471,00
4.2.01.01.01.04	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	1.984.065.454,00
4.2.01.01.01.05	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	76.545.360.688,00
4.2.01.01.01.07	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	25.457.395.100,00
4.2.01.01.01.08	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	9.814.880,00
4.2.01.01.01.09	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	316.912.000,00
4.2.01.01.01.010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	1.117.897.424,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.801.103.297.000,00
4.2.01.01.02.01	DAU	1.801.103.297.000,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	291.760.113.000,00
4.2.01.01.03.04	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	81.337.251.000,00
4.2.01.01.03.05	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SLB	1.585.982.000,00
4.2.01.01.03.010	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK	111.721.254.000,00
4.2.01.01.03.011	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	0,00
4.2.01.01.03.013	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	0,00
4.2.01.01.03.015	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	0,00
4.2.01.01.03.017	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	0,00
4.2.01.01.03.031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	13.852.452.000,00
4.2.01.01.03.032	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	12.195.734.000,00
4.2.01.01.03.034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	15.332.647.000,00

Kode	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	2	3
4.2.01.01.03.035	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	37.122.174.000,00
4.2.01.01.03.043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	18.612.619.000,00
4.2.01.01.03.046	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Kehutanan	0,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	848.411.640.000,00
4.2.01.01.04.01	DAK Non Fisik-BOS Reguler	498.656.380.000,00
4.2.01.01.04.03	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	11.093.750.000,00
4.2.01.01.04.04	DAK Non Fisik-TPG PNSD	309.752.127.000,00
4.2.01.01.04.05	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	2.217.000.000,00
4.2.01.01.04.06	DAK Non Fisik-TKG PNSD	0,00
4.2.01.01.04.09	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	3.500.000.000,00
4.2.01.01.04.010	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya	2.000.000.000,00
4.2.01.01.04.011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	16.287.980.000,00
4.2.01.01.04.016	DAK Non Fisik-PK2UKM	3.503.403.000,00
4.2.01.01.04.020	DAK Non Fisik-Dana Fasilitas Penanaman Modal	1.026.000.000,00
4.2.01.01.04.022	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	375.000.000,00
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	50.845.334.000,00
4.2.01.02.01	DID	50.845.334.000,00
4.2.01.02.01.01	DID	50.845.334.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	27.522.875.688,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	27.522.875.688,00
4.2.02.02.04	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota	27.522.875.688,00
4.2.02.02.04.01	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	27.522.875.688,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	14.602.101.735,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	14.602.101.735,00
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	815.442.000,00
4.3.01.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	815.442.000,00
4.3.01.01.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	815.442.000,00
4.3.01.04	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	3.673.080.000,00
4.3.01.04.01	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri	3.673.080.000,00
4.3.01.04.01.01	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri	3.673.080.000,00
4.3.01.05	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	10.113.579.735,00
4.3.01.05.01	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	10.113.579.735,00
4.3.01.05.01.01	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	10.113.579.735,00
	Jumlah Pendapatan	7.412.643.433.222,00
5	BELANJA	7.381.761.189.686,00
5.1	BELANJA OPERASI	4.636.204.889.720,96
5.1.01	Belanja Pegawai	2.145.054.774.646,42
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.127.714.395.920,17
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	838.153.975.590,01
5.1.01.01.01.01	Belanja Gaji Pokok PNS	803.579.619.051,01

Kode	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	2	3
5.1.01.01.01.02	Belanja Gaji Pokok PPPK	34.574.356.539,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	84.556.832.589,30
5.1.01.01.02.01	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	82.029.069.659,30
5.1.01.01.02.02	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	2.527.762.930,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	12.597.576.675,00
5.1.01.01.03.01	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	12.424.956.675,00
5.1.01.01.03.02	Belanja Tunjangan Jabatan PPPK	172.620.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	65.502.944.176,00
5.1.01.01.04.01	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	64.329.090.866,00
5.1.01.01.04.02	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	1.173.853.310,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	15.905.264.721,00
5.1.01.01.05.01	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	14.636.898.721,00
5.1.01.01.05.02	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1.268.366.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	49.331.151.507,50
5.1.01.01.06.01	Belanja Tunjangan Beras PNS	47.281.763.063,50
5.1.01.01.06.02	Belanja Tunjangan Beras PPPK	2.049.388.444,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.120.605.318,78
5.1.01.01.07.01	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.103.353.794,78
5.1.01.01.07.02	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	17.251.524,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	1.146.045.342,58
5.1.01.01.08.01	Belanja Pembulatan Gaji PNS	919.753.610,58
5.1.01.01.08.02	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	226.291.732,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	52.600.000.000,00
5.1.01.01.09.01	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	52.200.000.000,00
5.1.01.01.09.02	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	400.000.000,00
5.1.01.01.010	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.740.000.000,00
5.1.01.01.010.0 1	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	1.700.000.000,00
5.1.01.01.010.0 2	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	40.000.000,00
5.1.01.01.011	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	5.060.000.000,00
5.1.01.01.011.0 1	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	5.000.000.000,00
5.1.01.01.011.0 2	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	60.000.000,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	365.036.860.113,01
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	362.984.566.221,01
5.1.01.02.01.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	351.666.647.373,01
5.1.01.02.01.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	11.317.918.848,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	1.284.293.892,00
5.1.01.02.03.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1.284.293.892,00
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	768.000.000,00
5.1.01.02.04.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	768.000.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	404.933.405.858,74
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	77.540.946.663,62
5.1.01.03.01.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	29.753.935.461,35
5.1.01.03.01.02	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	22.240.270.642,73
5.1.01.03.01.03	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	25.370.281.838,78

Kode	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	2	3
5.1.01.03.01.04	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Permukaan	176.458.720,76
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	309.752.127.000,00
5.1.01.03.03.01	Belanja TPG PNSD	309.752.127.000,00
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	2.217.000.000,00
5.1.01.03.05.01	Belanja Tamsil Guru PNSD	2.217.000.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	15.423.332.195,12
5.1.01.03.07.01	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	13.626.855.850,25
5.1.01.03.07.02	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.796.476.344,87
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	68.998.297.470,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	2.696.400.000,00
5.1.01.04.01.01	Belanja Uang Representasi DPRD	2.696.400.000,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	377.496.000,00
5.1.01.04.02.01	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	377.496.000,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	438.238.920,00
5.1.01.04.03.01	Belanja Tunjangan Beras DPRD	438.238.920,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	231.120.000,00
5.1.01.04.04.01	Belanja Uang Paket DPRD	231.120.000,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	3.909.780.000,00
5.1.01.04.05.01	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	3.909.780.000,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	314.766.000,00
5.1.01.04.06.01	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	314.766.000,00
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	395.937.000,00
5.1.01.04.07.01	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	395.937.000,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	15.300.000.000,00
5.1.01.04.08.01	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	15.300.000.000,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	3.825.000.000,00
5.1.01.04.09.01	Belanja Tunjangan Reses DPRD	3.825.000.000,00
5.1.01.04.010	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	70.570.854,00
5.1.01.04.010.0	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	70.570.854,00
1		
5.1.01.04.012	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	23.613.588.696,00
5.1.01.04.012.0	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	360.000.000,00
1		
5.1.01.04.012.0	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	360.000.000,00
2		
5.1.01.04.012.0	Belanja Jaminan Kematian DPRD	58.650.000,00
3		
5.1.01.04.012.0	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	22.834.938.696,00
4		
5.1.01.04.013	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	17.640.000.000,00
5.1.01.04.013.0	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	17.640.000.000,00
1		
5.1.01.04.014	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	185.400.000,00
5.1.01.04.014.0	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	185.400.000,00
1		
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	2.830.040.277,50
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	75.600.000,00
5.1.01.05.01.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	75.600.000,00
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	9.072.000,00
5.1.01.05.02.01	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	9.072.000,00

Kode	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	2	3
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	136.080.000,00
5.1.01.05.03.01	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	136.080.000,00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	6.083.280,00
5.1.01.05.04.01	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	6.083.280,00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	3.203.617,50
5.1.01.05.05.01	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	3.203.617,50
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.380,00
5.1.01.05.06.01	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.380,00
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	100.000.000,00
5.1.01.05.07.01	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	100.000.000,00
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	250.000.000,00
5.1.01.05.08.01	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	250.000.000,00
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	250.000.000,00
5.1.01.05.09.01	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	250.000.000,00
5.1.01.05.010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	2.000.000.000,00
5.1.01.05.010.0 1	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor bagi KDH/WKDH	861.752.548,00
5.1.01.05.010.0 2	Belanja Insentif Pemungutan bagi KDH/WKDH atas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	694.357.811,00
5.1.01.05.010.0 3	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	439.961.415,00
5.1.01.05.010.0 4	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Permukaan	3.928.226,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	5.437.800.007,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	432.000.000,00
5.1.01.06.01.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	432.000.000,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	5.005.800.007,00
5.1.01.06.02.01	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	5.005.800.007,00
5.1.01.088	Belanja Pegawai BOS	86.771.735.000,00
5.1.01.088.088	Belanja Pegawai BOS	86.771.735.000,00
5.1.01.088.088. 8888	Belanja Pegawai BOS	86.771.735.000,00
5.1.01.099	Belanja Pegawai BLUD	83.332.240.000,00
5.1.01.099.099	Belanja Pegawai BLUD	83.332.240.000,00
5.1.01.099.099. 9999	Belanja Pegawai BLUD	83.332.240.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.783.971.961.661,54
5.1.02.01	Belanja Barang	389.361.982.254,54
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	389.127.727.964,54
5.1.02.01.01.01	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.756.158.000,00
5.1.02.01.01.02	Belanja Bahan-Bahan Kimia	1.950.593.818,00
5.1.02.01.01.04	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.436.909.620,00
5.1.02.01.01.05	Belanja Bahan-Bahan Baku	203.397.300,00
5.1.02.01.01.08	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	957.981.400,00
5.1.02.01.01.09	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	89.950.000,00
5.1.02.01.01.01 0	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	43.583.000,00
5.1.02.01.01.01 1	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	136.500.000,00
5.1.02.01.01.01 2	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	3.331.750.717,00
5.1.02.01.01.01 3	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	53.705.000,00

Kode	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	2	3
5.1.02.01.01.015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	30.020.000,00
5.1.02.01.01.019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	20.640.000,00
5.1.02.01.01.023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	50.750.000,00
5.1.02.01.01.024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	37.077.900.375,55
5.1.02.01.01.025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.969.418.865,15
5.1.02.01.01.026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	72.797.157.442,10
5.1.02.01.01.027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	699.120.003,64
5.1.02.01.01.028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	285.048.000,00
5.1.02.01.01.029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	94.664.800,00
5.1.02.01.01.030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	846.573.450,10
5.1.02.01.01.031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.364.278.497,00
5.1.02.01.01.032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	541.314.700,00
5.1.02.01.01.034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	519.576.500,00
5.1.02.01.01.035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	4.859.363.100,00
5.1.02.01.01.036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	8.669.876.283,00
5.1.02.01.01.037	Belanja Obat-Obatan-Obat	1.200.069.082,00
5.1.02.01.01.038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	13.346.244.960,00
5.1.02.01.01.039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	32.695.856.120,00
5.1.02.01.01.040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	96.301.407.000,00
5.1.02.01.01.044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	1.481.475.000,00
5.1.02.01.01.045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	559.445.400,00
5.1.02.01.01.052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	68.392.314.531,00
5.1.02.01.01.053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	11.380.673.100,00
5.1.02.01.01.054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	106.988.000,00
5.1.02.01.01.055	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	5.035.336.000,00
5.1.02.01.01.056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	284.657.000,00

Kode	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	2	3
5.1.02.01.01.057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	3.453.946.000,00
5.1.02.01.01.058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	4.256.334.000,00
5.1.02.01.01.059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	799.700.000,00
5.1.02.01.01.060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	1.381.250.000,00
5.1.02.01.01.063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	54.450.000,00
5.1.02.01.01.064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	637.740.000,00
5.1.02.01.01.068	Belanja Pakaian Siaga	13.250.000,00
5.1.02.01.01.069	Belanja Pakaian Teknik	97.200.000,00
5.1.02.01.01.070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	245.750.000,00
5.1.02.01.01.071	Belanja Pakaian Kerja Laboratorium	56.500.000,00
5.1.02.01.01.074	Belanja Pakaian Adat Daerah	1.059.000.000,00
5.1.02.01.01.075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	1.761.060.000,00
5.1.02.01.01.076	Belanja Pakaian Olahraga	2.566.907.900,00
5.1.02.01.01.077	Belanja Pakaian Paskibraka	166.743.000,00
5.1.02.01.01.078	Belanja Pakaian Jas/Safari	7.200.000,00
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	234.254.290,00
5.1.02.01.02.03	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	234.254.290,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	654.588.263.318,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	307.618.638.559,00
5.1.02.02.01.03	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	36.583.614.000,00
5.1.02.02.01.04	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	10.335.941.000,00
5.1.02.02.01.05	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	86.400.000,00
5.1.02.02.01.06	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	4.143.800.000,00
5.1.02.02.01.07	Honorarium Rohaniwan	24.400.000,00
5.1.02.02.01.08	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	340.218.000,00
5.1.02.02.01.011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	536.640.000,00
5.1.02.02.01.012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	1.776.000.000,00
5.1.02.02.01.013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	12.119.780.000,00
5.1.02.02.01.014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	984.370.000,00
5.1.02.02.01.015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	297.588.000,00

Kode	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	2	3
5.1.02.02.01.01 6	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	31.730.000,00
5.1.02.02.01.01 7	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	119.600.000,00
5.1.02.02.01.01 9	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	122.100.000,00
5.1.02.02.01.02 0	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	449.820.000,00
5.1.02.02.01.02 1	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	161.300.000,00
5.1.02.02.01.02 3	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	1.532.480.000,00
5.1.02.02.01.02 4	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	99.750.000,00
5.1.02.02.01.02 5	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	299.600.000,00
5.1.02.02.01.02 6	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	13.504.516.000,00
5.1.02.02.01.02 7	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	1.134.302.000,00
5.1.02.02.01.02 8	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	101.563.611.000,00
5.1.02.02.01.02 9	Belanja Jasa Tenaga Ahli	19.850.793.003,00
5.1.02.02.01.03 0	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	7.881.732.000,00
5.1.02.02.01.03 1	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	3.217.499.000,00
5.1.02.02.01.03 3	Belanja Jasa Tenaga Supir	169.464.000,00
5.1.02.02.01.03 4	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	72.000.000,00
5.1.02.02.01.03 5	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	81.492.000,00
5.1.02.02.01.03 6	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	103.500.000,00
5.1.02.02.01.03 7	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	62.710.000,00
5.1.02.02.01.03 8	Belanja Jasa Tata Rias	29.110.000,00
5.1.02.02.01.03 9	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	4.841.062.000,00
5.1.02.02.01.04 1	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	26.248.000,00
5.1.02.02.01.04 2	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	331.169.500,00
5.1.02.02.01.04 3	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	15.600.000,00
5.1.02.02.01.04 4	Belanja Jasa Pelayanan Perpustakaan	30.000.000,00
5.1.02.02.01.04 6	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	845.929.500,00

Kode	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	2	3
5.1.02.02.01.047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	4.823.699.100,00
5.1.02.02.01.048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	328.729.000,00
5.1.02.02.01.049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	531.497.000,00
5.1.02.02.01.050	Belanja Jasa Kalibrasi	90.290.200,00
5.1.02.02.01.051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	44.717.000,00
5.1.02.02.01.052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	467.050.000,00
5.1.02.02.01.053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	50.000.000,00
5.1.02.02.01.054	Belanja Jasa Jalan/Tol	85.000.000,00
5.1.02.02.01.055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	26.485.234.500,00
5.1.02.02.01.057	Belanja Jasa Operator Kapal	88.800.000,00
5.1.02.02.01.059	Belanja Tagihan Telepon	1.726.142.715,00
5.1.02.02.01.060	Belanja Tagihan Air	595.853.160,00
5.1.02.02.01.061	Belanja Tagihan Listrik	23.437.421.081,00
5.1.02.02.01.062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	3.625.942.000,00
5.1.02.02.01.063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	9.985.586.600,00
5.1.02.02.01.064	Belanja Paket/Pengiriman	210.224.000,00
5.1.02.02.01.065	Belanja Penambahan Daya	28.500.000,00
5.1.02.02.01.066	Belanja Registrasi/Keanggotaan	32.000.000,00
5.1.02.02.01.067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.634.492.200,00
5.1.02.02.01.071	Belanja Lembur	9.156.191.000,00
5.1.02.02.01.073	Belanja Medical Check Up	385.400.000,00
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	171.841.720.716,00
5.1.02.02.02.02	Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	95.262.552.000,00
5.1.02.02.02.03	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	69.389.837.096,00
5.1.02.02.02.05	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	4.523.640.000,00
5.1.02.02.02.06	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.560.198.720,00
5.1.02.02.02.07	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	271.418.400,00
5.1.02.02.02.08	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	834.074.500,00
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	575.000.000,00
5.1.02.02.03.01	Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal	443.000.000,00

Kode	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	2	3
5.1.02.02.03.05	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga	4.500.000,00
5.1.02.02.03.014	Belanja Sewa Tanah Pertanian	9.000.000,00
5.1.02.02.03.017	Belanja Sewa Tanah Lapangan Olahraga	4.500.000,00
5.1.02.02.03.035	Belanja Sewa Lapangan Lainnya	114.000.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	61.024.810.242,00
5.1.02.02.04.022	Belanja Sewa Electric Generating Set	47.000.000,00
5.1.02.02.04.031	Belanja Sewa Peralatan Selam	35.000.000,00
5.1.02.02.04.034	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	1.941.120.000,00
5.1.02.02.04.035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.755.106.000,00
5.1.02.02.04.036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	6.188.445.142,00
5.1.02.02.04.037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	71.632.000,00
5.1.02.02.04.040	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	47.190.000,00
5.1.02.02.04.043	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	1.840.942.000,00
5.1.02.02.04.045	Belanja Sewa Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	9.000.000,00
5.1.02.02.04.047	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Lainnya	56.000.000,00
5.1.02.02.04.049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	11.000.000,00
5.1.02.02.04.057	Belanja Sewa Kapal Terbang	29.587.800.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	3.688.517.500,00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	126.000.000,00
5.1.02.02.04.0120	Belanja Sewa Alat Pembersih	19.008.000,00
5.1.02.02.04.0121	Belanja Sewa Alat Pendingin	99.600.000,00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	77.442.600,00
5.1.02.02.04.0126	Belanja Sewa Meja Rapat Pejabat	2.385.000,00
5.1.02.02.04.0128	Belanja Sewa Kursi Rapat Pejabat	8.280.000,00
5.1.02.02.04.0130	Belanja Sewa Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	3.610.625.000,00
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	5.019.500.000,00
5.1.02.02.04.0133	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	207.850.000,00

Kode	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	2	3
5.1.02.02.04.0134	Belanja Sewa Peralatan Studio Gambar	769.000,00
5.1.02.02.04.0135	Belanja Sewa Peralatan Cetak	600.000,00
5.1.02.02.04.0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	141.750.000,00
5.1.02.02.04.0202	Belanja Sewa Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi	105.000.000,00
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	938.293.000,00
5.1.02.02.04.0404	Belanja Sewa Komputer Jaringan	24.680.000,00
5.1.02.02.04.0406	Belanja Sewa Komputer Unit Lainnya	60.000.000,00
5.1.02.02.04.0407	Belanja Sewa Peralatan Mainframe	811.792.000,00
5.1.02.02.04.0410	Belanja Sewa Peralatan Jaringan	3.681.633.000,00
5.1.02.02.04.0416	Belanja Sewa Elektronik/Electric	412.350.000,00
5.1.02.02.04.0445	Belanja Sewa Alat Deteksi Lainnya	388.500.000,00
5.1.02.02.04.0463	Belanja Sewa Alat Peraga Pelatihan	10.000.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	36.508.170.000,00
5.1.02.02.05.01	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	1.821.400.000,00
5.1.02.02.05.09	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	19.449.146.000,00
5.1.02.02.05.011	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	31.000.000,00
5.1.02.02.05.018	Belanja Sewa Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	37.000.000,00
5.1.02.02.05.025	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	122.000.000,00
5.1.02.02.05.030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	310.400.000,00
5.1.02.02.05.032	Belanja Sewa Bangunan Fasilitas Umum	68.000.000,00
5.1.02.02.05.033	Belanja Sewa Bangunan Parkir	15.000.000,00
5.1.02.02.05.036	Belanja Sewa Taman	181.085.000,00
5.1.02.02.05.037	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	79.800.000,00
5.1.02.02.05.043	Belanja Sewa Hotel	14.323.339.000,00
5.1.02.02.05.050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	70.000.000,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	236.475.000,00
5.1.02.02.07.013	Belanja Sewa Audio Visual	112.750.000,00
5.1.02.02.07.021	Belanja Sewa Musik Lainnya	72.600.000,00

Kode	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	2	3
5.1.02.02.07.028	Belanja Sewa Alat Musik	22.000.000,00
5.1.02.02.07.030	Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian	13.150.000,00
5.1.02.02.07.031	Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	8.500.000,00
5.1.02.02.07.057	Belanja Sewa Tanaman	7.475.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	51.842.518.400,00
5.1.02.02.08.02	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	2.003.000.000,00
5.1.02.02.08.03	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	70.000.000,00
5.1.02.02.08.05	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	1.006.249.000,00
5.1.02.02.08.07	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	443.000.000,00
5.1.02.02.08.08	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	13.538.910.000,00
5.1.02.02.08.09	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	9.688.138.400,00
5.1.02.02.08.013	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	6.500.000.000,00
5.1.02.02.08.015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	4.509.600.000,00
5.1.02.02.08.017	Belanja Pengembangan Pemanfaatan Ruang	648.000.000,00
5.1.02.02.08.018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	876.998.000,00
5.1.02.02.08.019	Belanja Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	251.023.000,00
5.1.02.02.08.020	Belanja Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	50.000.000,00
5.1.02.02.08.021	Belanja Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	300.000.000,00
5.1.02.02.08.022	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi dan Instalasi Proses dan Fasilitas Industri	4.641.000.000,00
5.1.02.02.08.027	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta	100.000.000,00
5.1.02.02.08.028	Belanja Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	12.500.000,00
5.1.02.02.08.031	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Inspeksi Teknikal	2.538.000.000,00
5.1.02.02.08.032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	3.186.600.000,00
5.1.02.02.08.033	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	100.000.000,00
5.1.02.02.08.034	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Bangunan	1.024.500.000,00
5.1.02.02.08.036	Belanja Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Teknik Sipil Keairan	275.000.000,00

Kode	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	2	3
5.1.02.02.08.03 8	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Pekerjaan Konstruksi Proses dan Fasilitas Industrial	80.000.000,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	11.677.595.000,00
5.1.02.02.09.01	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan	225.000.000,00
5.1.02.02.09.02	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi	720.000.000,00
5.1.02.02.09.03	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	1.293.033.000,00
5.1.02.02.09.04	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan	750.000.000,00
5.1.02.02.09.05	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pertambangan dan Energi	400.000.000,00
5.1.02.02.09.06	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kuangan	391.003.000,00
5.1.02.02.09.07	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pendidikan	75.000.000,00
5.1.02.02.09.09	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kependudukan	70.000.000,00
5.1.02.02.09.01 1	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	480.592.000,00
5.1.02.02.09.01 2	Belanja Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	2.475.000.000,00
5.1.02.02.09.01 3	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	77.048.000,00
5.1.02.02.09.01 4	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	4.571.919.000,00
5.1.02.02.09.01 5	Belanja Jasa Konsultansi Bidang Kepariwisata-Jasa Konsultansi Destinasi Pariwisata	29.000.000,00
5.1.02.02.09.01 9	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisata-Jasa Konsultansi Penelitian Kepariwisata	120.000.000,00
5.1.02.02.010	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	150.695.000,00
5.1.02.02.010.0 8	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika	150.695.000,00
5.1.02.02.011	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	49.200.000,00
5.1.02.02.011.0 2	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	49.200.000,00
5.1.02.02.012	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	13.063.440.401,00
5.1.02.02.012.0 1	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	4.609.557.800,00
5.1.02.02.012.0 2	Belanja Sosialisasi	2.516.326.000,00
5.1.02.02.012.0 3	Belanja Bimbingan Teknis	5.806.746.601,00
5.1.02.02.012.0 4	Belanja Diklat Kepemimpinan	130.810.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	120.271.976.605,00
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	76.500.000,00
5.1.02.03.01.04	Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	40.000.000,00
5.1.02.03.01.01 8	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah Lapangan Parkir	36.500.000,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	38.936.085.065,00
5.1.02.03.02.07	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Compacting Equipment	92.292.000,00

Kode	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	2	3
5.1.02.03.02.09	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader	54.678.000,00
5.1.02.03.02.01 2	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	183.150.000,00
5.1.02.03.02.01 6	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Kapal Tarik	79.077.500,00
5.1.02.03.02.01 8	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Apung-Alat Besar Apung Lainnya	9.864.000,00
5.1.02.03.02.02 1	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Compressor	49.120.000,00
5.1.02.03.02.02 2	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	368.530.000,00
5.1.02.03.02.02 3	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	27.000.000,00
5.1.02.03.02.03 4	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	10.561.000,00
5.1.02.03.02.03 5	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	19.513.834.765,00
5.1.02.03.02.03 6	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	6.845.186.500,00
5.1.02.03.02.03 8	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	37.000.000,00
5.1.02.03.02.04 3	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	786.221.000,00
5.1.02.03.02.04 9	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	40.480.000,00
5.1.02.03.02.09 6	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	640.000,00
5.1.02.03.02.01 11	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat-Alat Peternakan	19.250.000,00
5.1.02.03.02.01 13	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	48.120.000,00
5.1.02.03.02.01 17	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	5.116.409.300,00
5.1.02.03.02.01 18	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	517.410.000,00
5.1.02.03.02.01 20	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	64.683.200,00
5.1.02.03.02.01 21	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	1.172.466.100,00
5.1.02.03.02.01 22	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	4.068.700,00
5.1.02.03.02.01 23	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	288.970.000,00
5.1.02.03.02.01 24	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	3.250.000,00
5.1.02.03.02.01 25	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	40.000.000,00
5.1.02.03.02.01 30	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Tamu di Ruang Pejabat	1.600.000,00
5.1.02.03.02.01 31	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	4.800.000,00
5.1.02.03.02.01 32	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	72.000.000,00

Kode	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	2	3
5.1.02.03.02.01 35	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Cetak	24.150.000,00
5.1.02.03.02.01 37	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	2.000.000,00
5.1.02.03.02.02 38	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia Air Teknik Penyehatan	31.470.000,00
5.1.02.03.02.02 44	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Aspal, Cat, dan Kimia	34.350.000,00
5.1.02.03.02.02 45	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan	8.500.000,00
5.1.02.03.02.02 48	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	25.000.000,00
5.1.02.03.02.02 93	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain	60.000.000,00
5.1.02.03.02.03 76	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya	45.000.000,00
5.1.02.03.02.04 04	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	1.124.448.000,00
5.1.02.03.02.04 05	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	157.660.000,00
5.1.02.03.02.04 06	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	241.010.000,00
5.1.02.03.02.04 07	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	90.000.000,00
5.1.02.03.02.04 09	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	495.840.000,00
5.1.02.03.02.04 10	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	161.800.000,00
5.1.02.03.02.04 11	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	938.226.000,00
5.1.02.03.02.04 48	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Topi Kerja	5.000.000,00
5.1.02.03.02.04 94	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	40.969.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	8.461.443.020,00
5.1.02.03.03.01	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	5.984.922.317,00
5.1.02.03.03.02	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	143.488.000,00
5.1.02.03.03.03	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar	39.928.500,00
5.1.02.03.03.04	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi	133.440.000,00
5.1.02.03.03.08	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	8.640.000,00
5.1.02.03.03.09	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	157.698.503,00
5.1.02.03.03.01 1	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	200.000.000,00
5.1.02.03.03.01 3	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	1.350.000,00

Kode	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	2	3
5.1.02.03.03.017	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Museum	10.800.000,00
5.1.02.03.03.018	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	50.000.000,00
5.1.02.03.03.029	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan	70.000.000,00
5.1.02.03.03.030	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	174.000.000,00
5.1.02.03.03.032	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	401.941.000,00
5.1.02.03.03.036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	53.880.200,00
5.1.02.03.03.037	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	98.685.000,00
5.1.02.03.03.038	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	579.674.000,00
5.1.02.03.03.041	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	115.368.000,00
5.1.02.03.03.042	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Asrama	17.712.500,00
5.1.02.03.03.050	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	219.915.000,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	72.445.048.520,00
5.1.02.03.04.02	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi	55.427.698.820,00
5.1.02.03.04.012	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Provinsi	4.542.021.500,00
5.1.02.03.04.024	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	3.452.250.000,00
5.1.02.03.04.026	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	7.658.640.000,00
5.1.02.03.04.048	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	999.841.000,00
5.1.02.03.04.068	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	3.000.000,00
5.1.02.03.04.075	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Permukaan	20.004.000,00
5.1.02.03.04.0123	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Air Minum-Jaringan Air Minum Lainnya	14.000.000,00
5.1.02.03.04.0125	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	100.000.000,00
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	65.593.200,00
5.1.02.03.04.0131	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya	162.000.000,00
5.1.02.03.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	322.900.000,00
5.1.02.03.05.028	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Alat Musik	120.000.000,00
5.1.02.03.05.033	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah	30.000.000,00

Kode	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	2	3
5.1.02.03.05.03 7	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Tanda Penghargaan-Tanda Penghargaan Bidang Lainnya	172.900.000,00
5.1.02.03.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	30.000.000,00
5.1.02.03.06.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	30.000.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	214.547.785.408,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	212.326.727.408,00
5.1.02.04.01.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	153.705.336.707,00
5.1.02.04.01.02	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	1.065.131.000,00
5.1.02.04.01.03	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	19.068.420.200,00
5.1.02.04.01.04	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	24.667.358.501,00
5.1.02.04.01.05	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	13.820.481.000,00
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	2.221.058.000,00
5.1.02.04.02.01	Belanja Perjalanan Dinas Biasa€"Luar Negeri	2.221.058.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	40.890.760.900,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	14.227.263.400,00
5.1.02.05.01.01	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	1.782.463.400,00
5.1.02.05.01.02	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	2.341.000.000,00
5.1.02.05.01.03	Belanja Beasiswa	10.103.800.000,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	26.663.497.500,00
5.1.02.05.02.01	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	23.267.325.000,00
5.1.02.05.02.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	3.396.172.500,00
5.1.02.088	Belanja Barang dan Jasa BOS	179.227.059.840,00
5.1.02.088.088	Belanja Barang dan Jasa BOS	179.227.059.840,00
5.1.02.088.088.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	179.227.059.840,00
5.1.02.099	Belanja Barang dan Jasa BLUD	185.084.133.336,00
5.1.02.099.099	Belanja Barang dan Jasa BLUD	185.084.133.336,00
5.1.02.099.099.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	185.084.133.336,00
5.1.03	Belanja Bunga	3.547.643.288,00
5.1.03.04	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	3.547.643.288,00
5.1.03.04.03	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang	3.547.643.288,00
5.1.03.04.03.01	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang	3.547.643.288,00
5.1.05	Belanja Hibah	689.739.545.425,00
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	174.745.399.860,00
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	171.554.158.360,00
5.1.05.01.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	171.554.158.360,00
5.1.05.01.02	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	3.191.241.500,00
5.1.05.01.02.01	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	3.191.241.500,00
5.1.05.02	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	152.973.674.946,00
5.1.05.02.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	16.140.000.000,00
5.1.05.02.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	16.140.000.000,00
5.1.05.02.02	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	136.833.674.946,00
5.1.05.02.02.01	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	136.833.674.946,00
5.1.05.03	Belanja Hibah kepada BUMN	9.996.790.000,00

Kode	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	2	3
5.1.05.03.02	Belanja Hibah Barang kepada BUMN	9.996.790.000,00
5.1.05.03.02.01	Belanja Hibah Barang kepada BUMN	9.996.790.000,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	147.656.581.419,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	75.565.938.300,00
5.1.05.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	28.294.660.800,00
5.1.05.05.01.02	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	47.267.777.500,00
5.1.05.05.01.03	Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	3.500.000,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	42.093.442.160,00
5.1.05.05.02.01	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	21.018.230.000,00
5.1.05.05.02.02	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	20.325.212.160,00
5.1.05.05.02.03	Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	750.000.000,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial	29.997.200.959,00
5.1.05.05.03.01	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	20.500.000.000,00
5.1.05.05.03.02	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	9.497.200.959,00
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	194.843.760.000,00
5.1.05.06.03	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	191.952.770.000,00
5.1.05.06.03.01	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	191.952.770.000,00
5.1.05.06.04	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta	2.890.990.000,00
5.1.05.06.04.01	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta	2.890.990.000,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	9.523.339.200,00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	9.523.339.200,00
5.1.05.07.01.01	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	9.523.339.200,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	13.890.964.700,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	12.885.000.000,00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	12.680.000.000,00
5.1.06.01.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	12.680.000.000,00
5.1.06.01.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	205.000.000,00
5.1.06.01.02.01	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	205.000.000,00

Kode	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	2	3
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	1.005.964.700,00
5.1.06.03.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	50.000.000,00
5.1.06.03.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	50.000.000,00
5.1.06.03.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	955.964.700,00
5.1.06.03.02.01	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	955.964.700,00
5.2	BELANJA MODAL	1.250.016.555.778,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	3.624.600.000,00
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	3.624.600.000,00
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	2.015.000.000,00
5.2.01.01.01.04	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	2.015.000.000,00
5.2.01.01.03	Belanja Modal Lapangan	1.609.600.000,00
5.2.01.01.03.07	Belanja Modal Tanah untuk Jalan	1.500.000.000,00
5.2.01.01.03.08	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Air	109.600.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	115.932.440.032,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	3.136.463.820,00
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	2.692.500.000,00
5.2.02.01.01.03	Belanja Modal Excavator	1.680.000.000,00
5.2.02.01.01.01 2	Belanja Modal Alat Besar Darat Lainnya	1.012.500.000,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	443.963.820,00
5.2.02.01.03.04	Belanja Modal Electric Generating Set	425.000.000,00
5.2.02.01.03.05	Belanja Modal Pompa	6.567.000,00
5.2.02.01.03.01 6	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	12.396.820,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	1.073.246.000,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	1.071.046.000,00
5.2.02.02.01.01	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	400.000.000,00
5.2.02.02.01.02	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	472.230.000,00
5.2.02.02.01.04	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	198.816.000,00
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2.200.000,00
5.2.02.02.02.01	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	1.650.000,00
5.2.02.02.02.04	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bemotor Lainnya	550.000,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	111.539.600,00
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	77.965.600,00
5.2.02.03.01.03	Belanja Modal Perkakas Bengkel Listrik	6.092.600,00
5.2.02.03.01.01 0	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	71.873.000,00
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	3.324.000,00
5.2.02.03.02.07	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja	3.324.000,00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	30.250.000,00
5.2.02.03.03.09	Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain	28.500.000,00
5.2.02.03.03.02 1	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	1.750.000,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	5.252.524.800,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	5.252.524.800,00
5.2.02.04.01.01	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	1.036.750.000,00
5.2.02.04.01.02	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	47.150.000,00
5.2.02.04.01.05	Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian	64.000.000,00

Kode	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	2	3
5.2.02.04.01.06	Belanja Modal Alat Processing	1.715.000.000,00
5.2.02.04.01.07	Belanja Modal Alat Pasca Panen	2.371.850.000,00
5.2.02.04.01.09	Belanja Modal Alat-Alat Peternakan	17.774.800,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	14.898.784.840,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	5.701.405.580,00
5.2.02.05.01.01	Belanja Modal Mesin Ketik	14.800.000,00
5.2.02.05.01.02	Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah	25.476.000,00
5.2.02.05.01.04	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	506.133.000,00
5.2.02.05.01.05	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	5.154.996.580,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	7.454.065.260,00
5.2.02.05.02.01	Belanja Modal Mebel	3.124.574.550,00
5.2.02.05.02.03	Belanja Modal Alat Pembersih	78.626.900,00
5.2.02.05.02.04	Belanja Modal Alat Pendingin	2.015.944.200,00
5.2.02.05.02.05	Belanja Modal Alat Dapur	20.386.000,00
5.2.02.05.02.06	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.205.461.810,00
5.2.02.05.02.07	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	9.071.800,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	1.743.314.000,00
5.2.02.05.03.01	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	220.986.900,00
5.2.02.05.03.02	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	72.385.700,00
5.2.02.05.03.03	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	335.089.900,00
5.2.02.05.03.04	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	27.971.500,00
5.2.02.05.03.05	Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	13.860.000,00
5.2.02.05.03.06	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	373.102.000,00
5.2.02.05.03.07	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	699.918.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	2.339.508.100,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	2.314.408.100,00
5.2.02.06.01.01	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	758.608.700,00
5.2.02.06.01.02	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	244.476.600,00
5.2.02.06.01.03	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	57.324.500,00
5.2.02.06.01.04	Belanja Modal Peralatan Cetak	22.435.100,00
5.2.02.06.01.06	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	1.231.563.200,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	25.100.000,00
5.2.02.06.02.01	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	25.100.000,00
1		
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	459.710.950,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	413.160.950,00
5.2.02.07.01.01	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	113.160.950,00
5.2.02.07.01.02	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	300.000.000,00
9		
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	46.550.000,00
5.2.02.07.02.05	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	46.550.000,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	30.488.997.020,00
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	2.055.811.000,00
5.2.02.08.01.01	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	49.477.000,00
1		
5.2.02.08.01.04	Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian	1.112.069.000,00
1		
5.2.02.08.01.05	Belanja Modal Alat Laboratorium Lain	299.532.000,00
6		
5.2.02.08.01.06	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya	594.733.000,00
4		
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	28.072.185.920,00

Kode	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	2	3
5.2.02.08.03.09	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Keterampilan	13.263.920,00
5.2.02.08.03.014	Belanja Modal Alat Peraga Kejuruan	27.989.494.000,00
5.2.02.08.03.016	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	69.428.000,00
5.2.02.08.08	Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	361.000.100,00
5.2.02.08.08.06	Belanja Modal Peralatan Umum	361.000.100,00
5.2.02.010	Belanja Modal Komputer	12.148.100.120,00
5.2.02.010.01	Belanja Modal Komputer Unit	8.089.866.650,00
5.2.02.010.01.01	Belanja Modal Komputer Jaringan	192.000.000,00
5.2.02.010.01.02	Belanja Modal Personal Computer	2.729.602.200,00
5.2.02.010.01.03	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	5.168.264.450,00
5.2.02.010.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	4.058.233.470,00
5.2.02.010.02.02	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	462.162.000,00
5.2.02.010.02.03	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	342.839.500,00
5.2.02.010.02.04	Belanja Modal Peralatan Jaringan	162.557.500,00
5.2.02.010.02.05	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	3.090.674.470,00
5.2.02.011	Belanja Modal Alat Eksplorasi	58.060.500,00
5.2.02.011.02	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	58.060.500,00
5.2.02.011.02.02	Belanja Modal Elektronik/Electric	58.060.500,00
5.2.02.013	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	1.035.476.000,00
5.2.02.013.01	Belanja Modal Sumur	1.035.476.000,00
5.2.02.013.01.02	Belanja Modal Sumur Pemboran	1.035.476.000,00
5.2.02.014	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	6.840.000,00
5.2.02.014.01	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	6.840.000,00
5.2.02.014.01.02	Belanja Modal Elektrik	6.840.000,00
5.2.02.015	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	60.000.000,00
5.2.02.015.03	Belanja Modal Alat SAR	60.000.000,00
5.2.02.015.03.01	Belanja Modal Alat Penolong	60.000.000,00
5.2.02.016	Belanja Modal Alat Peraga	20.000.000,00
5.2.02.016.01	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	20.000.000,00
5.2.02.016.01.02	Belanja Modal Alat Peraga Percontohan	20.000.000,00
5.2.02.018	Belanja Modal Rambu-Rambu	1.085.990.500,00
5.2.02.018.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	1.085.990.500,00
5.2.02.018.01.03	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	1.085.990.500,00
5.2.02.019	Belanja Modal Peralatan Olahraga	21.849.600,00
5.2.02.019.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	21.849.600,00
5.2.02.019.01.06	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	21.849.600,00

Kode	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	2	3
5.2.02.088	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	27.369.638.638,00
5.2.02.088.088	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	27.369.638.638,00
5.2.02.088.088.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	27.369.638.638,00
5.2.02.099	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	16.365.709.544,00
5.2.02.099.099	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	16.365.709.544,00
5.2.02.099.099.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	16.365.709.544,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	303.025.048.354,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	277.037.821.160,05
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	266.919.971.660,05
5.2.03.01.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	50.615.810.700,00
5.2.03.01.01.04	Belanja Modal Bangunan Gedung Instalasi	10.280.000,00
5.2.03.01.01.08	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	949.509.000,00
5.2.03.01.01.09	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	5.179.258.000,00
5.2.03.01.01.01.0	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	136.110.706.960,05
5.2.03.01.01.01.1	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	30.514.901.200,00
5.2.03.01.01.01.2	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	185.040.000,00
5.2.03.01.01.01.3	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	50.886.000,00
5.2.03.01.01.01.8	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	199.332.000,00
5.2.03.01.01.02.9	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	11.161.750.000,00
5.2.03.01.01.03.0	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	28.901.431.800,00
5.2.03.01.01.03.2	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	2.758.784.000,00
5.2.03.01.01.03.3	Belanja Modal Bangunan Parkir	282.282.000,00
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	10.117.849.500,00
5.2.03.01.02.02	Belanja Modal Rumah Negara Golongan II	3.538.820.000,00
5.2.03.01.02.04	Belanja Modal Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan	6.047.039.500,00
5.2.03.01.02.01.3	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	531.990.000,00
5.2.03.02	Belanja Modal Monumen	1.316.375.193,95
5.2.03.02.01	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	1.316.375.193,95
5.2.03.02.01.02	Belanja Modal Tugu	1.316.375.193,95
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.849.294.000,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	1.849.294.000,00
5.2.03.04.01.03	Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	176.046.000,00
5.2.03.04.01.04	Belanja Modal Pagar	1.472.948.000,00
5.2.03.04.01.05	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya	200.300.000,00
5.2.03.099	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	22.821.558.000,00
5.2.03.099.099	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	22.821.558.000,00
5.2.03.099.099.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	22.821.558.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	798.803.110.870,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	778.633.830.370,00

Kode	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	2	3
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	743.533.387.080,00
5.2.04.01.01.02	Belanja Modal Jalan Provinsi	741.569.335.580,00
5.2.04.01.01.010	Belanja Modal Jalan Lainnya	1.964.051.500,00
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	35.100.443.290,00
5.2.04.01.02.02	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Provinsi	35.100.443.290,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	20.126.132.000,00
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	20.126.132.000,00
5.2.04.02.01.08	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	20.126.132.000,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	13.148.500,00
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	13.148.500,00
5.2.04.04.02.03	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	13.148.500,00
5.2.04.099	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	30.000.000,00
5.2.04.099.099	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	30.000.000,00
5.2.04.099.099.9999	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	30.000.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	28.631.356.522,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	587.019.000,00
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	469.550.000,00
5.2.05.01.01.01	Belanja Modal Buku Umum	246.550.000,00
5.2.05.01.01.012	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	223.000.000,00
5.2.05.01.02	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	117.469.000,00
5.2.05.01.02.01	Belanja Modal Audio Visual	117.469.000,00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	177.900.000,00
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	42.900.000,00
5.2.05.02.01.01	Belanja Modal Alat Musik	42.900.000,00
5.2.05.02.02	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan	135.000.000,00
5.2.05.02.02.02	Belanja Modal Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah	135.000.000,00
5.2.05.03	Belanja Modal Hewan	94.000.000,00
5.2.05.03.02	Belanja Modal Ternak	94.000.000,00
5.2.05.03.02.04	Belanja Modal Ternak Lainnya	94.000.000,00
5.2.05.07	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	100.000.000,00
5.2.05.07.01	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	100.000.000,00
5.2.05.07.01.01	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	100.000.000,00
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	6.034.501.000,00
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	6.034.501.000,00
5.2.05.08.01.05	Belanja Modal Software	259.000.000,00
5.2.05.08.01.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Dalam Pengerjaan	143.000.000,00
5.2.05.08.01.09	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud Lainnya	5.632.501.000,00
5.2.05.088	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	21.537.936.522,00
5.2.05.088.088	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	21.537.936.522,00
5.2.05.088.088.8888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	21.537.936.522,00
5.2.05.099	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	100.000.000,00
5.2.05.099.099	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	100.000.000,00
5.2.05.099.099.9999	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	100.000.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	31.500.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	31.500.000.000,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	31.500.000.000,00

Kode	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	2	3
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	31.500.000.000,00
5.3.01.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	31.500.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	1.464.039.744.187,04
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.464.039.744.187,04
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	1.464.039.744.187,04
5.4.01.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	1.235.021.078.580,00
5.4.01.01.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	1.235.021.078.580,00
5.4.01.01.02	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota	229.018.665.607,04
5.4.01.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota	229.018.665.607,04
	Jumlah Belanja	7.381.761.189.686,00
	Total Surplus/(Defisit)	30.882.243.536,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	75.000.000.000,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	75.000.000.000,00
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	75.000.000.000,00
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	75.000.000.000,00
6.1.01.07.01.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	75.000.000.000,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	75.000.000.000,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	105.882.243.536,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	105.882.243.536,00
6.2.03.04	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	105.882.243.536,00
6.2.03.04.03	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang	105.882.243.536,00
6.2.03.04.03.01	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	105.882.243.536,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	105.882.243.536,00

Kode	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	2	3
	Pembiayaan Neto	(30.882.243.536,00)
6.3	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)	0,00



2N5UU-kmxPifYfp

GUBERNUR LAMPUNG



ARINAL DJUNAIDI